

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberadaan komite sekolah sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program sekolah menjadi sangat penting. Apalagi saat ini Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya sebuah Komite Sekolah yang berperan sebagai semacam lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat (semacam lembaga legislatif) menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tak terhindarkan. Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite tersebut.

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Adapun perbedaannya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Komite Sekolah tentu tidak terbatas hanya untuk mengawasi dana sekolah saja, melainkan juga berperan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, berfungsi untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas sekolah,

serta menyalurkan partisipasi masyarakat pada sekolah. Tentu saja komite sekolah ini mesti diawali dengan melakukan upaya optimalisasi organisasi orang tua siswa di sekolah.

Upaya ini sangat penting lagi di saat keadaan budaya dan gaya hidup generasi kita sudah mulai tidak jelas sekarang ini. Dengan adanya upaya ini jalinan antara orang tua, dan sekolah, dapat bersama-sama mengantisipasi dan mengarahkan serta bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak di usia sekolah. Dengan demikian, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Komite Sekolah bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu saja Komite Sekolah mesti melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar pendidikan.

Agar independensi komite ini tetap terjaga, maka keanggotaannya tidak lagi memasukkan aparat sekolah dan pemerintahan. Komite Sekolah JPS keanggotaannya terdiri dari 50% anggota masyarakat dan 50% lagi birokrat, maka keanggotaan komite sekolah yang baru ini adalah orang tua siswa, tokoh masyarakat, pakar dan pengamat pendidikan, LSM-LSM, dan mungkin juga perwakilan-perwakilan dari organisasi masyarakat dan pemuda yang ada. Kepala Sekolah harus membantu terbentuknya komite ini. Selanjutnya pembentukan komite dilaporkan kepada instansi/satuan kerja setempat yang bertanggungjawab

atas penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian komite ini bersifat independen yang berkedudukan sebagai mitra sekolah dan berfungsi sebagai lembaga kontrol bagi sekolah.

Komite Sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Jika Komite Sekolah ini bisa dijalankan, berarti proses dan pelaksanaan pendidikan di sekolah akan berjalan sesuai prinsip demokrasi. Ini berarti lingkungan sekolah menjadi laboratorium dan contoh mikro dari realisasi masyarakat madani. Dengan demikian, masyarakat sekolah berarti menjalankan fungsi legislatif-eksekutif, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Jelas sekali bahwa memfungsikan MBS dan Komite Sekolah merupakan upaya demokratisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan berakar pada masyarakat yang tentunya mempunyai *sustainability* yang handal (Suharsaputra, 2009:90).

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Banyak diantara jenis dukungan yang diberikan masyarakat terhadap dunia pendidikan melalui sekolah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih

banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merehab sekolah, memperbaiki genting, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan setempat, ketrampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu. Namun demikian, hal tersebut belumlah terwujud karena berbagai alasan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang memiliki anak dan sudah tidak menempuh jenjang pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Huntu, tidak mempunyai perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan dibanding dengan sebagian masyarakat yang mempunyai anak dan masih mengikuti jenjang pendidikan pada sekolah tersebut.

Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam membantu sekolah yang memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus memahami cara mendorong peran serta masyarakat agar mereka mau membantu sekolah.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal ini Komite Sekolah perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini Komite Sekolah mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan pertimbangan kepada penyelenggara pendidikan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah serta sebagai menjadi penghubung antara pihak sekolah dengan orangtua siswa (mediator).

SDN 1 Huntu membentuk komite sekolah sejak tahun 2002 yang dulunya bernama BP3. Sejak tahun 2002 BP3 berubah nama menjadi komite sekolah. Tentu saja hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan demi kemajuan dan peningkatan kualitas sekolah. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji komite sekolah yang dibentuk di SDN 1 Huntu. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diformulasikan dengan judul: **Partisipasi Masyarakat Terhadap Komite Sekolah (Study pada SDN 1 Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kegiatan komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri I Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat terhadap komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri I Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis.**

- a. Secara teoritis penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan pendidikan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pendidikan

- c. Komite sekolah dapat meningkatkan pelayanannya dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN I Huntu Kecamatan Batudaa
- d. Mewujudkan peran komite sekolah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN I Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi komite sekolah dalam meningkatkan kepemimpinan masyarakat dan pengembangan komite di sekolah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lanjut yang ingin mengembangkan penelitian tentang partisipasi masyarakat melalui kegiatan komite.